

BAB III

DINAMIKA HUBUNGAN MESIR-ISRAEL (1979-2011)

Negara Mesir menjadi salah satu Negara yang cukup berpengaruh di bawah kepemimpinan Presiden Hosni Mubarak. Karir politik Hosni Mubarak bermula sejak Presiden Anwar Sadat mengangkatnya sebagai wakil presiden Mesir pada tahun 1981. Jabatan wakil presiden ini sebagai bentuk *reward* atas pertimbangan kesuksesan Hosni Mubarak sebagai Jenderal Angkatan Udara Mesir dalam perang Arab-Israel pada tahun 1973. Paska tragedi berdarah tahun 1981 yang menewaskan Presiden Anwar Sadat, wakil presiden Hosni Mubarak menggantikannya untuk memimpin Mesir

Selanjutnya, Hosni Mubarak menjabat sebagai presiden Mesir tahun 1981 dan terpilih kembali sebagai presiden selama lima kali berturut-turut dengan masing-masing masa jabatan enam tahun sebagaimana regulasi yang ditetapkan dalam konstitusi Mesir paska amandemen 1980. Dengan demikian, Hosni Mubarak tercatat sebagai presiden Mesir terlama dalam sejarah kepemimpinan Presiden Mesir yang berlangsung selama tiga puluh tahun sebelum akhirnya tumbang oleh gerakan *people power* menjelang akhir masa jabatannya sebagai presiden Mesir untuk kelima

A. Hubungan Mesir – Israel Sebelum Camp David

1. Sejarah Israel

Tanah Israel, yang dikenal dalam bahasa Ibrani sebagai *Eretz Yisrael*, merupakan tanah suci orang Yahudi. Menurut kitab Taurat, Tanah Israel dijanjikan kepada tiga Patriark Yahudi oleh Tuhan sebagai tanah air mereka. Pada cendekiawan memperkirakan periode ini ada pada milenium ke-2 SM. Menurut pandangan tradisional, sekitar abad ke-11 SM, beberapa kerajaan dan negara Israel didirikan disekitar Tanah Israel. Kerajaan-kerajaan dan negara-negara ini memerintah selama seribu tahun ke depan.

Antara periode Kerajaan-kerajaan Israel dan penaklukan Muslim abad ke-7, Tanah Israel jatuh di bawah pemerintahan Asiria, Babilonia, Persia, Yunani, Romawi, Sassania, dan Bizantium. Keberadaan orang Yahudi di wilayah tersebut berkurang drastis setelah kegagalan Perang Bar Kokhba melawan Kekaisaran Romawi pada tahun 132, menyebabkan pengusiran besar-besaran Yahudi. Pada tahun 628/9, Kaisar Bizantium Heraklius memerintahkan pembantaian dan pengusiran orang-orang Yahudi, mengakibatkan populasi Yahudi menurun lebih jauh. Walau demikian, terdapat sekelompok kecil populasi Yahudi yang masih menetap di tanah Israel. Tanah Israel direbut dari Kekaisaran Bizantium sekitar tahun 636 oleh penakluk Muslim. Selama lebih dari enam abad, kontrol wilayah tersebut berada di bawah kontrol Umayyah, Abbasiyah, dan Tentara Salib sebelum jatuh di bawah Kesultanan

Mameluk pada tahun 1260. Pada tahun 1516, Tanah Israel menjadi bagian dari Kesultanan Utsmaniyah, yang memerintah wilayah tersebut sampai pada abad ke-20.

a. Zionisme dan mandat Britania

Orang-orang Yahudi yang berdiaspora telah lama bercita-cita untuk kembali ke Zion dan Tanah Israel. Harapan dan kerinduan tersebut tercatat pada Alkitab dan merupakan tema pusat pada buku doa Yahudi. Pada permulaan abad ke-12, penindasan Yahudi oleh Katolik mendorong perpindahan orang-orang Yahudi Eropa ke Tanah Suci dan meningkatkan jumlah populasi Yahudi setelah pengusiran orang Yahudi dari Spanyol pada tahun 1492. Selama abad ke-16, komunitas-komunitas besar Yahudi kebanyakan berpusat pada Empat Kota Suci Yahudi, yaitu Yerusalem, Hebron, Tiberias, dan Safed. Pada pertengahan kedua abad ke-18, keseluruhan komunitas Hasidut yang berasal dari Eropa Timur telah berpindah ke Tanah Suci.

Imigrasi dalam skala besar, dikenal sebagai Aliyah Pertama, dimulai pada tahun 1881, yakni pada saat orang-orang Yahudi melarikan diri dari pogrom di Eropa Timur. Manakala gerakan Zionisme telah ada sejak dahulu kala, Theodor Herzl merupakan orang Yahudi pertama yang mendirikan gerakan politik Zionisme, yakni gerakan yang bertujuan mendirikan negara Yahudi di Tanah Israel. Pada tahun 1896, Herzl menerbitkan buku *Der Judenstaat (Negara Yahudi)*, memaparkan visinya tentang negara masa depan Yahudi; Tahun berikutnya ia kemudian mengetuai Kongres Zionis Sedunia pertama.

Aliyah Kedua (1904–1914) dimulai setelah terjadinya pogrom Kishinev. Sekitar 40.000 orang Yahudi kemudian berpindah ke Palestina. Baik gelombang pertama dan kedua migrasi tersebut utamanya adalah Yahudi Ortodoks, namun pada Aliyah Kedua ini juga meliputi pelopor-pelopor gerakan *kibbutz*. Selama Perang Dunia I, Menteri Luar Negeri Britania Arthur Balfour mengeluarkan pernyataan yang dikenal sebagai Deklarasi Balfour, yaitu deklarasi yang mendukung pendirian negara Yahudi di tanah Palestina. Atas permintaan Edwin Samuel Montagu dan Lord Curzon, disisipkan pula pernyataan "*it being clearly understood that nothing shall be done which may prejudice the civil and religious rights of existing non-Jewish communities in Palestine, or the rights and political status enjoyed by Jews in any other country*". Legiun Yahudi, sekelompok batalion yang terdiri dari sukarelawan-sukarelawan Zionis, kemudian membantu Britania menaklukkan Palestina. Oposisi Arab terhadap rencana ini berujung pada Kerusuhan Palestina 1920 dan pembentukan organisasi Yahudi yang dikenal sebagai Haganah (dalam Bahasa Ibrani artinya "Pertahanan").

Pada tahun 1922, Liga Bangsa-Bangsa mempercayakan mandat atas Palestina kepada Britania Raya. Populasi wilayah ini pada saat itu secara dominan merupakan Arab Muslim sedangkan pada wilayah perkotaan seperti Yerusalem, secara dominan

Imigrasi Yahudi berlanjut dengan Aliyah Ketiga (1919–1923) dan Aliyah Keempat (1924–1929), secara keseluruhan membawa 100.000 orang Yahudi ke Palestina. Setelah terjadinya kerusuhan Jaffa, Britania membatasi imigrasi Yahudi, dan wilayah yang ditujukan sebagai negara Yahudi dialokasikan di Transyordania. Meningkatnya gerakan Nazi pada tahun 1930 menyebabkan Aliyah kelima (1929–1939) dengan masuknya seperempat juta orang Yahudi ke Palestina. Gelombang masuknya Yahudi secara besar-besaran ini menimbulkan Pemberontakan Arab di Palestina 1936–1939, memaksa Britania membatasi imigrasi dengan mengeluarkan Buku Putih 1939. Sebagai reaksi atas penolakan negara-negara di dunia yang menolak menerima pengungsi Yahudi yang melarikan diri dari Holocaust, dibentuklah gerakan bawah tanah yang dikenal sebagai Aliyah Bet yang bertujuan untuk membawa orang-orang Yahudi ke Palestina. Pada akhir Perang Dunia II, jumlah populasi orang Yahudi telah mencapai 33% populasi Palestina, meningkat drastis dari sebelumnya yang hanya 11% pada tahun 1922.

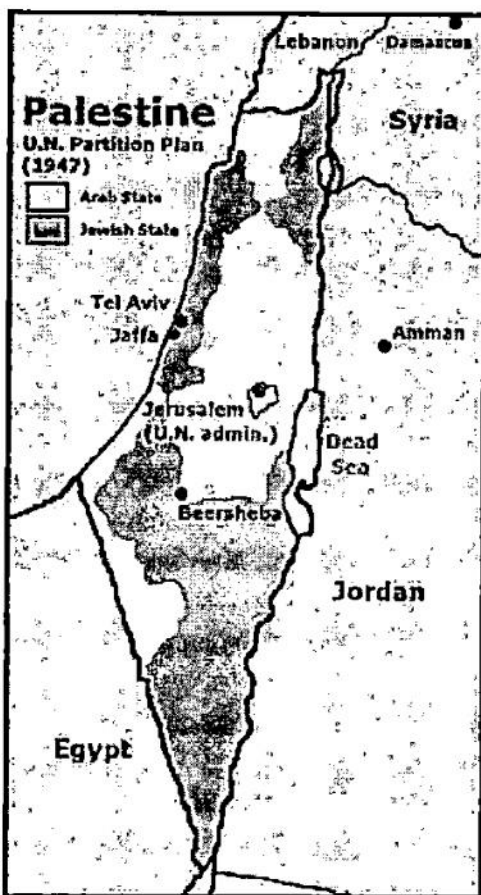
b. Kemerdekaan dan tahun-tahun pertama Negara Israel

David Ben-Gurion memproklamasikan kemerdekaan Israel dari Britania Raya pada 14 Mei 1948 di bawah potret Theodor Herzl. Setelah 1945, Britania Raya menjadi terlibat dalam konflik kekerasan dengan Yahudi. Pada tahun 1947, pemerintah Britania menarik diri dari Mandat Palestina, menyatakan bahwa Britania tidak dapat mencapai solusi yang diterima baik oleh orang Arab maupun Yahudi

Badan PBB yang baru saja dibentuk kemudian menyetujui Rencana Pembagian PBB (Resolusi Majelis Umum PBB 18) pada 29 November 1947. Rencana pembagian ini membagi Palestina menjadi dua negara, satu negara Arab, dan satu negara Yahudi. Yerusalem ditujukan sebagai kota Internasional *corpus separatum* yang diadministrasi oleh PBB untuk menghindari konflik status kota tersebut. Komunitas Yahudi menerima rencana tersebut, tetapi Liga Arab dan Komite Tinggi Arab menolaknya atas alasan kaum Yahudi mendapat 55% dari seluruh wilayah tanah meskipun hanya merupakan 30% dari seluruh penduduk di daerah ini. Pada 1 Desember 1947, Komite Tinggi Arab mendeklarasikan pemogokan selama 3 hari, dan kelompok-kelompok Arab mulai menyerang target-target Yahudi. Perang saudara dimulai ketika kaum Yahudi yang mula-mulanya bersifat defensif perlahan-lahan menjadi ofensif. Ekonomi warga Arab-Palestina runtuh dan sekitar 250.000 warga Arab-Palestina diusir ataupun melarikan diri.

Pada 14 Mei 1948, sehari sebelum akhir Mandat Britania, Agensi Yahudi memproklamasikan kemerdekaan dan menamakan negara yang didirikan tersebut sebagai "Israel". Sehari kemudian, gabungan lima negara Arab – Mesir, Suriah, Yordania, Lebanon dan Irak – menyerang Israel, menimbulkan Perang Arab-Israel 1948. Maroko, Sudan, Yemen dan Arab Saudi juga membantu mengirimkan pasukan. Setelah satu tahun pertempuran, gencatan senjata dideklarasikan dan batas wilayah sementara yang dikenal sebagai *Garis Hijau* ditentukan. Yordania kemudian menganeksasi wilayah yang dikenal sebagai Tepi Barat dan Yerusalem Timur,

sedangkan Mesir mengontrol Jalur Gaza. Israel kemudian diterima sebagai anggota PBB pada tanggal 11 Mei 1949. Selama konflik ini, sekitar 711.000 orang Arab Palestina (80% populasi Arab) mengungsi keluar Palestina.



Peta rencana pembagian Palestina. Daerah berwarna jingga merupakan wilayah negara Yahudi, sedangkan daerah berwarna kuning merupakan wilayah negara Arab

Pada masa-masa awal kemerdekaannya, gerakan Zionisme buruh yang dipimpin oleh Perdana Menteri David Ben Gurion mendominasi politik Israel

Tahun-tahun ini ditandai dengan imigrasi massal para korban yang selamat dari Holocaust dan orang-orang Yahudi yang diusir dari tanah Arab. Populasi Israel meningkat dari 800.000 menjadi 2.000.000 dalam jangka waktu sepuluh tahun antara 1948 sampai dengan 1958. Kebanyakan pengungsi tersebut ditempatkan di perkemahan-perkemahan yang dikenal sebagai *ma'abarot*. Sampai tahun 1952, 200.000 imigran bertempat tinggal di kota kemah ini. Adanya desakan untuk menyelesaikan krisis ini memaksa Ben-Gurion menandatangani perjanjian antara Jerman Barat dengan Israel. Perjanjian ini menimbulkan protes besar kaum Yahudi yang tidak setuju Israel berhubungan dengan Jerman.

Selama tahun 1950-an, Israel terus menerus diserang oleh militan Palestina yang kebanyakan berasal dari Jalur Gaza yang diduduki oleh Mesir. Pada tahun 1956, Israel bergabung ke dalam sebuah aliansi rahasia bersama dengan Britania Raya dan Perancis, yang bertujuan untuk merebut kembali Terusan Suez yang sebelumnya telah dinasionalisasi oleh Mesir (lihat Krisis Suez). Walaupun berhasil merebut Semenanjung Sinai, Israel dipaksa untuk mundur atas tekanan dari Amerika Serikat dan Uni Soviet sebagai ganti atas jaminan hak pelayaran Israel di Laut Merah dan Terusan Suez.

Pada permulaan dekade selanjutnya, Israel berhasil menangkap dan mengadili Adolf Eichmann, seorang penggagas utama Solusi Akhir yang bersembunyi di Argentina. Peradilan ini memiliki pengaruh yang kuat terhadap

kepedulian publik terhadap Holocaust, dan sampai sekarang Eichmann merupakan satu-satunya orang yang dieksekusi oleh Israel. walaupun John Demjanjuk juga dijatuhi hukuman mati sebelum kemudian putusan tersebut dibalikkan oleh Mahkamah Agung Israel.²⁶

c. Konflik dan perjanjian damai

Negara-negara Arab selama bertahun-tahun menolak hak Israel untuk berdiri. Nasionalisme Arab yang dipimpin oleh Nasser menyerukan penghancuran negara Israel. Pada tahun 1967, Mesir, Suriah, dan Yordania menutup perbatasannya dengan Israel dan mengusir pasukan perdamaian PBB keluar dari wilayah tersebut serta memblokir akses Israel terhadap Laut Merah. Israel kemudian melancarkan serangan terhadap pangkalan angkatan udara Mesir karena takut akan terjadinya invasi oleh Mesir. Hal ini kemudian berujung pada Perang Enam Hari yang kemudian dimenangkan oleh Israel. Pada perang ini, Israel berhasil merebut Tepi Barat, Jalur Gaza, Semenanjung Sinai, dan Dataran Tinggi Golan. *Garis Hijau* menjadi penanda batas antara wilayah administrasi Israel dengan Wilayah pendudukan Israel. Batas wilayah Yerusalem juga diperluas dengan memasukkan wilayah Yerusalem Timur. Sebuah undang-undang yang mengesahkan pemasukan wilayah ini kemudian ditetapkan. Hal ini kemudian berujung pada Resolusi Dewan Keamanan PBB 478 yang menyatakan bahwa penetapan ini tidak sah dan melanggar hukum internasional.

Kegagalan negara-negara Arab pada perang tahun 1967 kemudian menyebabkan tumbuhnya gerakan kemerdekaan Palestina oleh Organisasi Pembebasan Palestina (PLO). Pada akhir 1960-an dan awal 1970-an, beberapa kelompok militer Palestina melancarkan berbagai gelombang serangan terhadap warga-warga Israel di seluruh dunia, termasuk pula pembunuhan atlet-atlet Israel pada Olimpiade München 1972. Israel membalas aksi tersebut dengan melancarkan Operasi Wrath of God (Kemarahan Tuhan). Pada operasi ini, orang-orang yang bertanggung jawab terhadap peristiwa München ini dilacak dan dibunuh.

Pada hari Yom Kippur 6 Oktober 1973 yang merupakan hari suci Yahudi, pasukan Mesir dan Suriah melancarkan serangan mendadak terhadap Israel. Perang tersebut berakhir pada tanggal 26 Oktober dengan Israel berhasil memukul balik pasukan Mesir dan Suriah. Walaupun demikian perang ini dianggap sebagai kekalahan Israel. Sebuah komisi yang dibentuk untuk menginvestigasi perang ini membebaskan pemerintah Israel dari tanggung jawab. Namun kemarahan publik Israel pada akhirnya memaksa Perdana Menteri Golda Meir untuk mengundurkan diri.

Pemilihan Knesset 1977 menandai terjadinya titik balik dalam sejarah perpolitikan Israel. Pada pemilihan ini, Menachem Begin yang berasal dari partai Likud mengambil alih kontrol pemerintahan dari Partai Buruh Israel. Pada tahun itu pula Presiden Mesir Anwar El Sadat melakukan kunjungan ke Israel dan

mengucapkan pidato di depan Knesset. Aksi ini dilihat sebagai pengakuan kedaulatan Israel yang pertama oleh negara Arab. Dua tahun kemudian, Sadat dan Menachem Begin menandatangani Persetujuan Camp David dan Perjanjian Damai Israel-Mesir. Israel menarik mundur pasukannya dari semenanjung Sinai dan setuju untuk bernegosiasi membahas otonomi warga Palestina yang berada di luar *Garis Hijau*, namun rencana tersebut tidak pernah diimplementasikan. Pemerintahan Begin mendukung warga Israel untuk bermukim di Tepi Barat, mengakibatkan konflik dengan warga Palestina di daerah tersebut.

Pada tanggal 7 Juni 1981, Israel membombardir reaktor nuklir Osirak milik Irak pada Operasi Opera. Badan intelijen Israel, Mossad, mencurigai reaktor nuklir tersebut akan digunakan Irak untuk mengembangkan senjata nuklir. Pada tahun 1982, Israel melakukan intervensi pada Perang Saudara Lebanon untuk menghancurkan basis-basis serangan Organisasi Pembebasan Palestina di Israel Utara. Intervensi ini kemudian berkembang menjadi Perang Lebanon Pertama. Israel menarik pasukannya dari Lebanon pada tahun 1986. Intifada Pertama yang merupakan perlawanan rakyat Palestina terhadap pemerintahan Israel. terjadi pada tahun 1987, menyebabkan terjadinya kekerasan di daerah pendudukan Israel. Selama 6 tahun berikutnya, lebih dari seribu orang tewas; kebanyakan merupakan korban kekerasan internal warga Palestina. Selama Perang Teluk 1991, PLO dan kebanyakan warga Palestina mendukung Saddam Hussein dan Irak dalam melancarkan serangan misil terhadap

Yitzhak Rabin dan Yasser Arafat berjabat tangan, dipantau oleh Bill Clinton, pada penandatanganan Persetujuan Oslo pada 13 September 1993. Pada tahun 1992, Yitzhak Rabin menjadi Perdana Menteri Israel setelah memenangkan pemilihan umum legislatif Israel 1992. Yitzhak Rabin dan partainya mendukung adanya kompromi dengan tetangga-tetangga Israel. Setahun kemudian, Shimon Peres dan Mahmoud Abbas, sebagai wakil Israel dan PLO, menandatangani Persetujuan Oslo. Persetujuan ini memberikan Otoritas Nasional Palestina hak untuk memerintah di Tepi Barat dan Jalur Gaza. Selain itu, juga dinyatakan pula pengakuan hak Israel untuk berdiri dan menyerukan berakhirnya terorisme. Pada tahun 1994, Perjanjian Damai Israel-Yordania ditandatangani, membuat Yordania menjadi negara Arab kedua yang melakukan normalisasi hubungan dengan Israel.

Dukungan publik Arab terhadap persetujuan ini menurun setelah terjadinya peristiwa pembantaian umat Muslim yang sedang bersembahyang di Masjid Ibrahimiyah oleh sekelompok ekstremis gerakan Kach. Selain itu, pemukiman warga Israel di daerah pendudukan yang masih berlanjut, serta menurunnya kondisi ekonomi Palestina juga menurunkan dukungan publik Arab. Dukungan publik Israel terhadap persetujuan ini juga berkurang setelah terjadinya rentetan kasus bom bunuh diri yang dilakukan oleh Hamas. Pembunuhan Yitzhak Rabin yang dilakukan oleh ekstremis Yahudi ketika ia sedang meninggalkan sebuah pawai yang mendukung perdamaian dengan Palestina mengejutkan seluruh negeri.

Pada akhir 1990-an, Israel yang dipimpin oleh Benjamin Netanyahu menarik mundur pasukannya dari Hebron dan menandatangani Memorandum Sungai Wye. Memorandum tersebut memberikan Otoritas Nasional Palestina kontrol yang lebih luas.

Ehud Barak yang merupakan Perdana Menteri terpilih pada pemilihan tahun 1999 memulai pemerintahannya dengan menarik mundur pasukan Israel dari Lebanon Selatan dan melakukan negosiasi dengan Ketua Otoritas Palestina Yasser Arafat dan Presiden Amerika Serikat Bill Clinton pada Pertemuan Camp David bulan Juli tahun 2000. Dalam pertemuan itu, Barak menawarkan rencana pendirian Negara Palestina, namun Yasser Arafat menolak tawaran tersebut. Setelah negosiasi gagal, Intifada Kedua dimulai.

Ariel Sharon menjadi Perdana Menteri Israel yang baru setelah memenangi pemilihan tahun 2001. Pada masa pemerintahannya, Sharon secara sepihak menarik mundur pasukan Israel dari Jalur Gaza dan membangun dinding pemisah di perbatasan Tepi Barat. Pada Januari 2006, setelah Ariel Sharon menderita stroke berat dan berada dalam keadaan koma kekuasaannya diantikan oleh Ehud Olmert.²⁷

2. Perang Arab-Israel 1948



Perang Arab-Israel 1948 atau disebut juga sebagai "Perang Kemerdekaan" atau "Perang Pembebasan" oleh orang Israel, adalah konflik bersenjata pertama dari serangkaian konflik yang terjadi antara Israel dan tetangga-tetangga Arabnya dalam konflik Arab-Israel. Bagi orang-orang Palestina, perang ini menandai awal dari rangkaian kejadian yang disebut sebagai "Bencana".

Pada tahun 1947, Perserikatan Bangsa-Bangsa memutuskan untuk membagi wilayah Mandat Britania atas Palestina. Tetapi hal ini ditentang keras oleh negara-negara Timur Tengah lainnya dan juga banyak negeri-negeri Muslim. Kaum Yahudi mendapat 55% dari seluruh wilayah tanah meskipun hanya merupakan 30% dari seluruh penduduk di daerah ini. Sedangkan kota Yerusalem yang dianggap suci, tidak

hanya oleh orang Yahudi tetapi juga orang Muslim dan Kristen, akan dijadikan kota internasional.

Israel diproklamasikan pada tanggal 14 Mei 1948 dan sehari kemudian langsung diserbu oleh tentara dari Lebanon, Suriah, Yordania, Mesir, Irak dan negara Arab lainnya. Tetapi Israel bisa memenangkan peperangan ini dan malah merebut kurang lebih 70% dari luas total wilayah daerah mandat PBB Britania Raya, Palestina. Perang ini menyebabkan banyak kaum Palestina mengungsi dari daerah Israel. Tetapi di sisi lain tidak kurang pula kaum Yahudi yang diusir dari negara-negara Arab lainnya.²⁸

Perang ini jelas melibatkan Mesir karena Negara mesir merupakan bagian dari Negara-negara Arab. Mesir termasuk dalam rombongan yang menyerang Israel karena memang Negara-negara Arab memerangi Israel dan Negara mesir pun masuk dalam susunan Negara-negara arab. Seiring dengan adanya ketegangan dan perang antara Negara-negara arab dengan Israel. Hubungan Mesir dan Israel pun waktu itu memang mengalami ketegangan yang dimana memang terjadi kontak senjata antar kedua Negara. Hubungan ini malah semakin memburuk semenjak Israel memenangi peperangan dengan Negara-negara Arab dan merebut kurang lebih 70% dari luas total wilayah daerah mandat PBB Britania Raya. Posisi Negara Mesir dalam perang tahun

1948 ini adalah termasuk dalam rombongan susunan Negara-negara arab yang memerangi Israel.

3. Krisis Suez

Krisis suez atau yang biasa disebut perang Sinai adalah serangan militer Britania Raya, Perancis dan Israel terhadap Mesir yang dimulai pada tanggal 29 Oktober 1956. Serangan ini dilancarkan karena pada tanggal 26 Juli 1956, Mesir menasionalisasikan Terusan Suez setelah tawaran Britania Raya dan Amerika Serikat untuk mendanai pembangunan Bendungan Aswan dicabut.

Terusan Suez dibuka pada tahun 1869, didanai oleh pemerintah Perancis dan Mesir. Secara teknis, wilayah yang mengelilingi terusan ini merupakan wilayah kedaulatan Mesir, dan perusahaan yang mengurusnya, *Universal Company of the Suez Maritime Canal (Suez Canal Company)* adalah perusahaan mesir.

Terusan ini penting bagi Britania Raya dan negara-negara Eropa lainnya. Bagi Britania, terusan ini merupakan penghubung ke koloni Britania di India, Timur Jauh, Australia dan Selandia Baru. Maka pada tahun 1875, Britania membeli saham dari Suez Canal Company, memperoleh sebagian kekuasaan atas pengoperasian terusan dan membaginya dengan investor swasta Perancis. Pada tahun 1882, selama invasi dan pendudukan Mesir Britania Raya secara *de facto* menguasai terusan ini

Konvensi Konstantinopel 1888 mendeklarasikan terusan ini sebagai zona netral dibawah perlindungan Britania. Dalam meratifikasinya, Kesultanan Utsmaniyah setuju untuk memberikan izin terhadap kapal internasional melewati terusan tersebut, baik saat perang maupun damai.

Terusan Suez menunjukkan betapa strategis wilayah tersebut selama Perang Rusia-Jepang ketika Jepang melakukan persetujuan dengan Britania. Jepang melancarkan serangan kejutan terhadap Armada Pasifik Rusia yang berbasis di Port Arthur. Ketika Rusia mengirim bantuan dari Baltik, Britania tidak memperbolehkan Rusia melewati terusan. Hal ini menyebabkan armada Rusia mengelilingi seluruh benua Afrika, memberikan waktu bagi tentara Jepang untuk mereorganisir tentara mereka dan memperkuat posisi mereka di Timur Jauh.

Kepentingan terusan ini juga terlihat jelas selama Perang Dunia. Pada Perang Dunia Pertama, Britania dan Perancis menutup terusan ini untuk kapal non-Sekutu. Selama Perang Dunia Kedua, Terusan Suez dilindungi selama Kampanye Afrika Utara.

Pada Mei 1948, Mandat Britania atas Palestina berakhir, dan tentara Britania mundur dari wilayah tersebut. Deklarasi Kemerdekaan Israel dideklarasikan, dan ditentang oleh Liga Arab. Hal ini menyebabkan terjadinya Perang Arab-Israel 1948.

Tentara Israel berhasil memenangkan perang melawan Arab, termasuk Mesir.

Negosiasi perdamaian setelah perang gagal ditambah dengan meningkatnya

ketegangan perbatasan antara Israel dan tetangganya, menyebabkan meningkatnya permusuhan antara Arab dan Israel.

Operasi yang bertujuan merebut Terusan Suez ini berhasil dari sisi militer, namun merupakan bencana politik. Bersama dengan krisis Suez, Amerika Serikat juga harus mengurus Revolusi Hongaria. Amerika Serikat juga takut akan adanya perang yang lebih luas setelah Uni Soviet dan negara-negara Pakta Warsawa lainnya mengancam untuk membantu Mesir dan melancarkan serangan roket ke London, Paris dan Tel Aviv.

Maka dari itu, pemerintahan Eisenhower menyatakan gencatan senjata. Amerika Serikat meminta invasi dihentikan dan mensponsori resolusi di Dewan Keamanan PBB yang meminta gencatan senjata. Britania dan Perancis, sebagai anggota tetap, memveto resolusi tersebut. Amerika Serikat lalu memohon kepada Majelis Umum PBB dan mengusulkan resolusi meminta gencatan senjata dan ditariknya pasukan.

Operasi yang bertujuan merebut Terusan Suez ini berhasil dari sisi militer, namun merupakan bencana politik. Bersama dengan krisis Suez, Amerika Serikat juga harus mengurus Revolusi Hongaria. Amerika Serikat juga takut akan adanya perang yang lebih luas setelah Uni Soviet dan negara-negara Pakta Warsawa lainnya mengancam untuk membantu Mesir dan melancarkan serangan roket ke London,

Maka dari itu, pemerintahan Eisenhower menyatakan gencatan senjata. Amerika Serikat meminta invasi dihentikan dan mensponsori resolusi di Dewan Keamanan PBB yang meminta gencatan senjata. Britania dan Perancis, sebagai anggota tetap, memveto resolusi tersebut. Amerika Serikat lalu memohon kepada Majelis Umum PBB dan mengusulkan resolusi meminta gencatan senjata dan ditariknya pasukan. Majelis Umum mengadakan "sesi khusus kedaruratan" dan mengadopsi resolusi Majelis 1001, yang mendirikan United Nations Emergency Force (UNEF), dan menyatakan gencatan senjata. Portugal dan Islandia mengusulkan untuk mengeluarkan Britania dan Perancis dari pakta pertahanan North Atlantic Treaty Organization (NATO) jika mereka tidak mau mundur dari Mesir. Britain and France withdrew from Egypt within a week.

Amerika Serikat juga melancarkan tekanan finansial terhadap Britania Raya untuk mengakhiri invasi. Eisenhower memerintahkan George M. Humphrey untuk menjual bagian dari "*US Government's Sterling Bond holdings*". Pemerintah AS memegangnya sebagai bagian dari bantuan ekonomi terhadap Britania setelah Perang Dunia II, dan pembayaran sebagian hutang Britania kepada AS, dan juga bagian dari Rencana Marshall untuk membangun kembali ekonomi Eropa Barat.

Arab Saudi juga memulai embargo minyak terhadap Britania dan Perancis. AS menolak membantu minyak bumi hingga Britania dan Perancis setuju untuk

mundur. Negara NATO lainnya juga menolak untuk menjual minyak bumi yang mereka terima dari negara-negara Arab ke Britania atau Perancis.

Pemerintah Britania dan pound sterling berada dalam tekanan. Sir Anthony Eden, Perdana Menteri Britania Raya, terpaksa untuk mundur dan mengumumkan gencatan senjata pada tanggal 6 November. Tentara Perancis dan Inggris selesai mundur pada tanggal 22 Desember 1956, dan digantikan oleh tentara Kolombia dan Denmark yang merupakan bagian dari UNEF. The Israelis left the Sinai in March, 1957. Umum mengadakan "sesi khusus kedaruratan" dan mengadopsi resolusi Majelis 1001, yang mendirikan United Nations Emergency Force (UNEF), dan menyatakan gencatan senjata. Portugal dan Islandia mengusulkan untuk mengeluarkan Britania dan Perancis dari pakta pertahanan North Atlantic Treaty Organization (NATO) jika mereka tidak mau mundur dari Mesir. Britain and France withdrew from Egypt within a week.

Amerika Serikat juga melancarkan tekanan finansial terhadap Britania Raya untuk mengakhiri invasi. Eisenhower memerintahkan George M. Humphrey untuk menjual bagian dari "*US Government's Sterling Bond holdings*". Pemerintah AS memegangnya sebagai bagian dari bantuan ekonomi terhadap Britania setelah Perang Dunia II, dan pembayaran sebagian hutang Britania kepada AS, dan juga bagian dari Rencana Marshall untuk membangun kembali ekonomi Eropa Barat.

Arab Saudi juga memulai embargo minyak terhadap Britania dan Perancis. AS menolak membantu minyak bumi hingga Britania dan Perancis setuju untuk mundur. Negara NATO lainnya juga menolak untuk menjual minyak bumi yang mereka terima dari negara-negara Arab ke Britania atau Perancis.

Pemerintah Britania dan pound sterling berada dalam tekanan. Sir Anthony Eden, Perdana Menteri Britania Raya, terpaksa untuk mundur dan mengumumkan gencatan senjata pada tanggal 6 November. Tentara Perancis dan Inggris selesai mundur pada tanggal 22 Desember 1956, dan digantikan oleh tentara Kolombia dan Denmark yang merupakan bagian dari UNEF. The Israelis left the Sinai in March, 1957.²⁹

4. Perang 6 Hari

Perang Enam juga dikenali sebagai Perang Arab-Israel 1967, merupakan peperangan antara Israel menghadapi gabungan tiga negara Arab, yaitu Mesir, Yordania, dan Suriah, dan ketiganya juga mendapatkan bantuan aktif dari Irak, Kuwait, Arab Saudi, Sudan dan Aljazair. Perang tersebut berlangsung selama 132 jam 30 menit (kurang dari enam hari), hanya di front Suriah saja perang berlangsung enam hari penuh.

²⁹ http://id.wikipedia.org/wiki/Krisis_Suez

Pada bulan Mei tahun 1967, Mesir mengusir United Nations Emergency Force (UNEF) dari Semenanjung Sinai; ketika itu UNEF telah berpatroli disana sejak tahun 1957 (yang disebabkan oleh invasi atas Semenanjung Sinai oleh Israel tahun 1956). Mesir mempersiapkan 1.000 tank dan 100.000 pasukan di perbatasan dan memblokade Selat Tiran (pintu masuk menuju Teluk Aqaba) terhadap kapal Israel dan memanggil negara-negara Arab lainnya untuk bersatu melawan Israel. Pada tanggal 5 Juni 1967, Israel melancarkan serangan terhadap pangkalan angkatan udara Mesir karena takut akan terjadinya invasi oleh Mesir. Yordania lalu menyerang Yerusalem Barat dan Netanya. Pada akhir perang, Israel merebut Yerusalem Timur, Jalur Gaza, Semenanjung Sinai, Tepi Barat, dan Dataran Tinggi Golan. Hasil dari perang ini memengaruhi geopolitik kawasan Timur Tengah sampai hari ini.

B. Hubungan Mesir – Israel di Camp David (1979-1981)

Hubungan Negara Mesir dengan Israel bisa dikatakan controversial. Awal kemesraan Negara ini adalah dengan ditandai dengan perjanjian camp david itu sendiri. Camp David sendiri merupakan bisa dikatakan tonggak atau fondasi yang membuat Negara ini sampai sekarang bisa tetap menjalin hubungan baik.

Mesir memiliki kepentingan internasional dan domestik yang bertepatan dan menuntunnya ke salah satu strategi yang dominan. Perekonomian Mesir telah lesu sepanjang 1970-an, karena sebagian besar pengeluaran pertahanan.³⁰ Sadat menyadari

³⁰Caplan, Neil and Laura Zittrain Eisenberg. Negotiating Arab-Israeli Peace.

pemulihan yang akan tergantung pada peningkatan investasi baik dari tetangga kaya minyak Arab dan pengeluaran militer berkurang. Dia tidak bisa menurunkan anggaran pertahanan sampai ia yakin bahwa Israel tidak lagi menjadi ancaman, jaminan yang akan memerlukan perjanjian perdamaian dan penarikan Israel dari Sinai. Kebutuhan keamanan ini tidak dapat terpenuhi tanpa keterlibatan aktif dari Amerika Serikat.

Strategi Sadat demikian bertujuan terkesan baik di Amerika dan negara-negara Arab lainnya. Yang pertama ia merasa mudah dapat dicapai dengan terus menunjukkan fleksibilitas dan, dalam kata-kata itu Menteri Luar Negeri Muhammad Ibrahim Kamil, "mengekspos kekerasan pendirian Israel sebelum AS dan sebelum dunia". Tujuan yang terakhir ini lebih sulit, seperti Sadat telah kehilangan beberapa modal politik dengan rekan-rekan Arab nya dengan mengakui Israel. Untuk mendapatkan kembali mendukung Arab, ia harus mengamankan penarikan Israel dari semua wilayah yang diduduki dan untuk menetapkan hak penentuan nasib sendiri bagi Palestina. Kedua gol menjadi garis bawah Mesir di Camp David.

Israel telah sebagian besar pertimbangan domestik dan internasional yang sama seperti Mesir, tetapi posisi pada awal negosiasi jauh berbeda. Ini juga adalah untuk menghadapi penurunan ekonomi, seperti spiral anggaran pertahanan yang menyebabkan inflasi merajalela. Internasional, keprihatinan utama Israel adalah keamanan, dan perang 1973 telah menunjukkan bahwa keunggulan militer belaka

bukan penghalang cukup kuat untuk musuh Arabnya. Mulailah merasa dia bisa memecahkan kedua masalah secara simultan melalui tiga aspek perdamaian bilateral dengan Mesir. Dengan menghilangkan negara anggota terbesar dari koalisi Arab, Israel mampu ratchet down anggaran pertahanan saat masih merasa aman terhadap ancaman militer potensial. Oleh karena itu, garis bawah Begin adalah sebuah perjanjian damai dengan Mesir dan demiliterisasi Sinai, sambil menghindari sebagai penghubung banyak pertanyaan dalam negeri Palestina volatile mungkin.³¹

Pada tanggal 31 Maret 1979, kongres Arab memutuskan mengeluarkan Mesir dari Liga Arab dan memutuskan hubungan diplomatis dengan Mesir serta pemindahan Markas Besar Liga Arab dari kairo ke Tunisia. Ini membuat Mesir terkucil dari dunia Arab yang dulu sebagai pemimpin Arab setelah Camp David hanya menjadi Paria. Kesatuan Arab telah rusak parah sebagai akibatnya posisi bangsa Arab pun melemah.

Orang Mesir sendiri sangat tidak suka dengan Camp David, mereka sama-sama tertekan dengan saudara Arab mereka dengan dampak dari kerangka kerja untuk perdamaian. Keterisolasian membawa Mesir berhubungan dekat dengan Barat dan Israel yang berlawanan dengan identitas Arab yang anti barat. Sadat yang awalnya memosisikan dirinya ketika sebelum perang Yom Kippur sebagai presiden yang saleh

³¹ Stein, Janis Gross. "The Political Economy of Security Agreements." Double-Edged Diplomacy. Ed. Peter B. Evans, Harold K. Jacobson, and Robert D. Putnam. Berkeley: California UP, 1993. 101.

walaupun rakyat Mesir tau itu tidak tulus terbukti berubah total sangat terlihat menikmati gaya hidup glamor dan merestui westernisasi Barat kepada rakyat Mesir. Namun mayoritas Mesir melawan ajakan dan teladan buruk Sadat ini dimotori oleh organisasi Ikhwanul Muslimun.³² yang pernah dekat dengan Sadat, Faraj (Pemimpin Abd Al-Salam Faraj) dan organisasi islam radikal lainnya dengan cara kembali kepada ajaran Islam yang puritan. Organisasi Faraj adalah yang paling berhasil membunuh Sadat melalui Letnan Satu Khaled Islambouli pada tanggal 6 Oktober 1981 bertepatan dengan Idul Adha dalam sebuah acara perayaan kemenangan Perang Yom Kippur Mesir melawan Israel di tahun 1973. Kematian Sadat disyukuri oleh mayoritas rakyat Mesir dan negara-negara Arab, hanya di Eropa dan AS kematian sadat diratapi. Berbeda dengan Nasser yang wafat pada tahun 1970 rakyat Mesir di Kairo tumpah ruah dijalan dan menangis seperti kehilangan seorang pahlawan.

Menjelang KTT Gerakan Negara Non-Blok (GNB) VI di Havana, Kuba (3-9 September 1979), terjadi pergeseran peta politik yang penting di kawasan Timur-Tengah, yaitu dengan terjadinya Revolusi Islam yang digerakkan oleh kaum ulama dibawah kepemimpinan Ayatulloh Khomeini, yang berhasil menyingkirkan rezim Dinasti Pahlevi Di Iran (Februari 1979). Keberhasilan revolusi ini tidak hanya membuat AS "terlempar" dari Iran, tapi juga mengakibatkan bubarnya CENTO pada 26 September 1979, sesudah Iran (pada 6 Februari 1979) dan Pakistan (pada 12 Maret 1979) menyatakan keluar dari aliansi militer itu. Iran pun mulai diterima sebagai anggota GNB. Pada KTT Havana terjadi titik balik dimana Mesir yang sebelumnya

³² Al Husaini, Ishak Musa. *Ikhwanul Muslimun*. Jakarta: Grafiti Pers, 1983

“sangat dihormati” karena posisinya sebagai salah satu pendiri GNB berbalik menjadi pihak yang dikecam habis-habisan dan dituduh sebagai “Antek AS” karena menandatangani perjanjian Camp David (1978) dan perdamaian Mesir-Israel dianggap telah “mengkianati” GNB, dan karenanya harus dikucilkan dari GNB. Sikap GNB ini dimotori oleh Kuba, Negara-negara Arab dan kelompok radikal lainnya. Bagi AS keberhasilan menjadi mediator Perundingan Camp David dapat membuat citra positif bagi negeri ini dimata dunia setelah citra buruk mereka ketika perang Vietnam. Keberhasilan AS menjadi Mediator yang berhasil terulang kembali 14 tahun setelah Camp David oleh Presiden Bill Clinton yaitu Antara PLO, Yaser Arafat dan Yishak Rabin Perdana Menteri Israel. Namun kedua perundingan yang di mediasi oleh AS baik itu camp David atau 14 tahun setelahnya sama-sama memakan korban pemimpin perundingan, Yaitu Anwar Sadat dan Yishak Rabin penyebabnya sama yaitu ketidakpuasan kelompok ekstrim kanan kedua negara tersebut terhadap perundingan. Mungkin pemimpin AS tidak bakal menjadi korban tetapi Negara ini tetap menjadi sumber kebencian rakyat Negara miskin dunia dan Negara yang anti Barat.

C. Hubungan Mesir-Israel era 1981-2011

Hubungan Mesir Israel di era ini atau pada masa perjanjian Camp David dan setelahnya bisa dikatakan mengalami pergolakan. Oleh karena itulah Amerika Serikat berinisiatif untuk menjadi penengah dalam perundingan antara kedua Negara ini. Ada

beberapa hasil dari hasil perundingan ini. Tentunya hasil ini ini banyak berdampak pada hubungan kedua Negara ini.

Perjanjian Begin dengan Mesir mendorong terbentuknya dua gerakan baru di Israel. Pertama adalah sebuah kelompok pemuda kiri mendirikan gerakan Shalom Akshav atau gerakan damai sekarang (*Peace Now Movement*), ini bukan partai politik tetapi hanya kelompok penekan eskalasi kekerasan. Pada perkembangannya simpatisan kelompok ini bergabung dengan partai PLP (*Progressive List for Peace*) yang pada pemilu tahun 1984 mendapatkan 2 kursi di Knesset atau 1,8 persen suara. Kedua adalah sebuah kelompok ekstrem kanan Partai Tehiya didirikan dan para anggota Gush Emunim tak akan pernah memaafkan Begin karena memaksa mengevakuasi para pemukim Yahudi di Sinai. Mereka telah memandang pemukiman-pemukiman disana sebagai garis depan umat pilihan didalam perang suci. Perjanjian damai dengan kaum goyim atau kafir adalah sebuah perjanjian penuh dosa dengan musuh Tuhan.

Dengan tergulingnya rezim Hosni Mubarak dari kekuasaan, warga Mesir tidak lantas menghentikan aksi demo mereka. Ribuan warga Mesir berunjuk rasa di depan Kedutaan Besar Israel di Kairo menuntut pemutusan hubungan bilateral dengan rezim Zionis. Demonstrasi anti-Israel Rabu (27/4) dimulai dari depan kampus Universitas

Pengunjuk rasa meneriakkan yel-yel mampus Israel, dan mendesak pemerintah Kairo segera memutuskan semua hubungan dengan Israel. Mereka juga menyerukan pembekuan ekspor gas dari Mesir ke Tel Aviv. Massa mengancam akan melanjutkan aksi unjuk rasa besar-besaran jika pemerintah Kairo saat ini tidak tanggap menyikapi tuntutan rakyatnya sendiri terkait pemutusan hubungan dengan rezim Israel.³³

Koalisi Pemuda Revolusioner Mesir di Alexandria dalam statemennya akan menggelar demonstrasi yang diikuti jutaan massa pada 13 Mei mendatang untuk mendukung intifadha ketiga Palestina melawan brutalitas rezim Zionis. Tidak hanya itu, mereka juga mendesak pembukaan gerbang Rafah dan pembatalan perjanjian Camp David yang ditandatangani mantan Presiden Mesir Anwar Sadat dan Mantan Perdana Menteri Israel, Menachem Begin pada 1979 silam.

Pasca kepemimpinan Sadat, diktator Mesir Hosni Mubarak melanjutkan penerapan perjanjian itu. Di bawah rezim Mubarak yang didukung AS, Mesir konsisten melayani kepentingan Israel dan membantu menerapkan blokade penuh atas Jalur Gaza.

Seiring meningkatkan tuntutan anti-Israel rakyat Mesir, Ikhwanul Muslimin baru-baru ini mendesak Dewan Tinggi Angkatan Bersenjata untuk mengambil langkah cepat dalam mematahkan blokade Gaza. Partai-partai politik Mesir menilai

blokade Gaza hanya melayani kepentingan Amerika dan Israel di wilayah tersebut dan mengancam stabilitas regional dan independensi Kairo.

Menyikapi gelombang tuntutan rakyat terkait pembatalan perjanjian Camp David dan dukungan terhadap cita-cita Palestina, Ahmed Doma, anggota Komisi Eksekutif Revolusi Mesir mendesak Dewan Militer Negeri Piramida ini menggelar referendum. Doma memprediksikan hasil referendum akan membatalkan kesepakatan busuk yang menjauhkan Mesir dari posisi sejatinya sebagai pembela Palestina. Tidak hanya itu, anggota Komisi Eksekutif Revolusi Mesir ini juga menegaskan bahwa revolusi rakyat Mesir tidak hanya mengancam hubungan Kairo-Tel Aviv, tapi juga mengguncang eksistensi Israel.³⁴

Mesir di bawah kepemimpinan Hosni Mubarak menjadi salah satu kekuatan yang paling berpengaruh di kawasan Timur Tengah. Adapun manifestasi pengaruh kuat Mesir di bawah kepemimpinan Hosni Mubarak seperti terlihat terutama dalam formula kebijakan politik luar negeri Mesir.

Di antaranya, terdapat pada pandangan Husni Mubarak dalam politik luar negeri ketika terjadi perang antara Irak dan Kuwait serta perang Irak dan Iran. Kemudian, Mesir secara konsisten menegaskan sikap politik luar negerinya untuk menjadi sekutu utama pengaruh kekuatan Amerika Serikat di Timur Tengah dengan bersama-sama Amerika Serikat mencari memerangi serangan terorisme oleh kelompok

Bentuk hubungan antara Mesir dengan Israel bisa dikatakan semakin mesra. Karena terbukti dalam sebuah sumber mengatakan bahwa adanya komunikasi politik yang dilakukan oleh Benyamin Netanyahu dan Husni Mubarak terkait hubungan antara kedua Negara yang mengangkat isu-isu strategis yang sekiranya dapat berpengaruh terhadap baik buruk hubungan kedua Negara ini. Dalam komunikasi politik tersebut terkuak bahwa.

Benyamin Netanyahu mengatakan bahwa Presiden Mesir Husni Mubarak menyampaikan undangannya pada Benyamin Netanyahu lewat telepon, untuk bertemu di Sharm El-Sheik, sebuah kawasan wisata resort di pinggiran Laut Merah, Mesir. "Perdana Menteri (Benyamin Netanyahu) menyambut baik undangan itu dan pertemuan akan dilakukan sesegera mungkin," kata sumber tadi. Masih menurut sumber tersebut, Benyamin Netanyahu menegaskan pada Husni Mubarak bahwa perdamaian antara kedua negara (Israel-Mesir) sangat penting dan Israel serta Mesir memiliki kepentingan yang sama untuk memperkuat perdamaian itu dan menolak segala bentuk ancaman terhadap kedua negara. Mesir adalah salah satu negara Muslim yang membuka hubungan diplomatik dengan Israel lewat perjanjian Camp David tahun 1979 yang bertempat di Amerika dan ditengahi oleh Amerika Serikat itu sendiri. Hubungan Mesir-Israel sempat tegang ketika Menteri luar negeri Israel yang baru Avigdor Lieberman melontarkan pernyataan yang menyinggung Mesir. Lieberman mengatakan "Mubarak could go to hell" jika pemimpin Mesir itu tidak mau berkunjung ke Israel. Lieberman juga menyatakan bahwa bendungan Aswan di

Mesir seharusnya dibom. Mesir tak mau kalah. Menlu Mesir Ahmed Abul Gheit membalas pernyataan Lieberman. Kantor berita Mesir, MENA mengutip pernyataan Abul Gheit yang mengatakan bahwa ia tidak akan mau bersalaman jika bertemu dengan Lieberman.³⁵

Dari sumber tersebut terkuak bahwa hubungan kedua Negara ini antara Mesir dan Israel memang sempat tegang setelah Menteri luar Israel Avigdor Lieberman mengeluarkan pernyataan yang bisa dikatakan menyinggung masyarakat Mesir pada umumnya dan Pemerintahan Mesir pada khususnya. Tetapi secara keseluruhan hubungan kedua Negara ini berlangsung baik karena niat baik Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu disambut baik oleh Presiden Mesir Husni Mubarak.

D. Hubungan Mesir-Israel dipengaruhi oleh Amerika Serikat

Kalau sebagian analisis memunculkan sebuah pertanyaan, siapakah yang lebih kuat, Amerika atau Israel, maka tidak banyak yang memberikan jawaban yang tepat. Karena secara fisik dan fenomena perpolitikan dunia, Amerikalah yang memberikan perlindungan kepada Israel, bukan sebaliknya.

Namun jika diteliti lebih dalam, kemana arah perpolitikan Amerika Serikat, maka orang atau para analisis akan menemukan di situlah keuntungan yang dimiliki oleh agenda terselubung Israel. Dalam arti kata, kepentingan Amerika Serikat adalah

³⁵ <http://www.eramuslim.com/berita/dunia/hubungan-mesir-israel-makin-mesra.htm>

kepentingan Israel pula dan sebaliknya. Maka kedua Negara ini sangatlah erat kaitannya terhadap perpolitikan dunia termasuk menempatkan kepentingannya di Timur Tengah.

Hubungan Negara Mesir dan Israel sudahlah sangat lama dipengaruhi oleh Amerika Serikat. Dari semenjak Amerika mulai menyadari bagaimana pentingnya urusan kedua Negara ini di Timur Tengah. Data sejarah di atas membuktikan betapa kentalnya hubungan kedua Negara ini yang dipengaruhi oleh nagara Amerika Serikat. Dan fakta sudah membuktikan bahwasanya Negara Israel adalah "anak emas" Amerika Serikat. Mesir pun Negara yang strategis d Timur Tengah. jadi sudah jelas bahwa hubungan antara Mesir dan Israel pun sangat dipengaruhi oleh Amerika Serikat. Hal ini bisa dipastikan berlangsung sampai kepentingan-kepentingan AMerika Serikat di Timur Tengah masih ada yang Israel pun masih menjadi "anak emas" Amerika Serikat.